

# Dinamika Diplomasi Pos: Kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU) dalam Perspektif Hubungan Internasional

Aplida Lisarah Pohan  
Wawan Budi Darmawan

Universitas Padjadjaran

Email: [aplida20001@mail.unpad.ac.id](mailto:aplida20001@mail.unpad.ac.id)  
[wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id](mailto:wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id)

## ABSTRACT

*The partnership between PT Pos Indonesia and the Universal Postal Union (UPU) in the context of international relations reflects the application of the liberalism paradigm. Liberalism, with its basic assumptions such as interdependence, mutual gains, and the belief in interdependence, provides a foundation for explaining the dynamics of international cooperation. In the context of the Pos Indonesia-UPU partnership, diplomacy is a key element that facilitates dialogue, negotiation, and agreement to achieve common goals. Institutional liberalism also plays a role in the creation of international regimes to strengthen cooperation. The research methodology uses a descriptive approach with a focus on the analysis of the impact of diplomacy, trade, and global stability of the partnership. Literature studies and policy analysis support the collection of primary and secondary data. The results of the study show that the Pos Indonesia-UPU partnership is not only about postal services but also reflects economic, global security, and technological development impacts in line with liberal principles. Challenges and barriers, such as improving service quality and competitiveness, can be overcome with investment and strong relationships with UPU. The liberal guide to innovation and progress is reflected in technological development and improved service quality. This partnership is an example of how liberalism shapes interactions between countries in the era of globalization, providing a positive contribution to diplomacy, economic growth, global security, and the development of postal services.*

**Keywords:** *Universal Postal Union (UPU), PT. Pos Indonesia, Liberalism*

*Kemitraan antara PT Pos Indonesia dan Universal Postal Union (UPU) dalam konteks hubungan internasional menggambarkan penerapan paradigma liberalisme. Liberalisme, dengan asumsi dasar seperti saling ketergantungan, keuntungan bersama, dan keyakinan pada interdependensi, menjadi landasan dalam menjelaskan dinamika kerjasama internasional. Dalam kaitannya dengan kemitraan Pos Indonesia-UPU, diplomasi menjadi elemen kunci yang memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Liberalisme institusional turut berperan dalam penciptaan rezim internasional untuk memperkuat kerjasama. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada analisis dampak diplomasi, perdagangan, dan kestabilan global dari kemitraan tersebut. Studi literatur dan analisis kebijakan mendukung pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan Pos Indonesia-UPU tidak hanya mengenai layanan pos tetapi juga menggambarkan dampak ekonomi, keamanan global, dan pengembangan teknologi sesuai prinsip liberalisme. Tantangan dan hambatan, seperti peningkatan kualitas layanan dan daya saing, dapat diatasi dengan investasi dan hubungan yang kuat dengan UPU. Panduan liberalisme untuk inovasi dan kemajuan tercermin dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas layanan. Kemitraan ini menjadi contoh bagaimana liberalisme membentuk interaksi antarnegara di era globalisasi, memberikan kontribusi positif dalam diplomasi, pertumbuhan ekonomi, keamanan global, dan pengembangan layanan pos.*

**Kata Kunci:** *Universal Postal Union (UPU), PT. Pos Indonesia, Liberalisme*

## **Pendahuluan**

Hubungan internasional mencakup berbagai pola interaksi antar negara yang melibatkan konflik, kerjasama, perang, dan diplomasi (White, 2001; 318). Kerjasama antar negara dapat terjadi sebagai upaya bersama mencapai kepentingan yang saling menguntungkan. Selain itu, kerjasama juga seringkali menjadi sarana untuk menanggulangi masalah yang sulit diatasi secara individu oleh negara-negara tersebut. Pentingnya kerjasama telah menjadi hal lazim dalam dinamika hubungan internasional di era kontemporer. Kerjasama tidak hanya terbatas pada interaksi antara negara-negara, melainkan juga dapat melibatkan pihak-pihak non-negara. Fenomena globalisasi semakin memperluas peluang bagi aktor-aktor hubungan internasional, baik negara maupun non-negara, untuk terlibat dalam interaksi yang lebih intens. Konsep kerjasama menjadi kunci dalam memahami bagaimana negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau mengatasi tantangan bersama. Dalam kerangka ini, kerjasama tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keuntungan bersama, tetapi juga sebagai cara untuk mengatasi masalah kompleks yang melebihi kapasitas penyelesaian masing-masing negara. Tidak hanya antar negara, kerjasama juga dapat melibatkan aktor non-negara, seperti organisasi internasional, lembaga swasta, atau kelompok masyarakat sipil. Fenomena ini semakin diperkuat oleh dinamika globalisasi, di mana batas-batas antara negara dan non-negara menjadi semakin kabur. Konsep kerjasama dalam hubungan internasional tidak hanya mencakup interaksi antara negara-negara, tetapi juga mencerminkan realitas kompleks yang melibatkan berbagai aktor. Globalisasi memberikan dampak signifikan dalam membuka peluang dan tantangan baru bagi aktor-aktor ini untuk saling berinteraksi, memperluas cakupan kerjasama internasional, dan menghadapi permasalahan bersama (Sudagung dkk, 2015). Dalam hubungan internasional terdapat sebuah pendekatan berupa liberalisme.

Liberalisme, seperti yang diuraikan oleh Mansbach dan Rafferty (2008;26), mengakui bahwa dalam konteks politik, aktor dapat mencapai keuntungan bersama atau mengalami kerugian bersama dalam apa yang dikenal sebagai permainan *variable-sum*. Kelompok liberalisme juga menitikberatkan pada pemenuhan keuntungan absolut oleh aktor, di mana semua pihak dapat mengambil manfaat dari suatu hubungan internasional (Mansbach dan Rafferty, 2008; 26). Sebuah pendekatan liberalisme lainnya, yakni neoliberalisme, menekankan bahwa setiap aktor saling tergantung satu sama lain untuk mempertahankan kelangsungannya dan memiliki takdir yang bersamaan (Mansbach dan Rafferty, 2008; 27). Mansbach dan Rafferty (2008; 27) mengemukakan bahwa kondisi saling ketergantungan inilah yang mendorong aktor untuk bekerjasama guna mencapai tujuan bersama. Konsep ini diperkuat oleh Dunne (2001; 176), yang menyatakan bahwa negara bersedia melakukan kerjasama karena mendapatkan "*absolute gains*" yang lebih diutamakan daripada melihat "*relative gains*" yang diperoleh oleh pihak lain. Oleh karena itu, kerjasama dalam hubungan internasional lebih dilihat sebagai pertemuan keuntungan bagi kedua aktor. Asumsi dasar teori liberalisme juga dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen (2009; 139). Pertama, liberalisme memandang positif terhadap sifat manusia. Kedua, liberalisme meyakini bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konflik. Ketiga, liberalisme percaya pada kemajuan, yang mencakup kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan

(Jackson dan Sorensen, 2009; 143). Asumsi-asumsi ini memberikan landasan untuk menjelaskan bahwa kerjasama, sebagai suatu bentuk kemajuan, merupakan cara yang dianut oleh kelompok liberal dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks liberalisme upaya untuk menjembatani ketidakpastian dan mendorong kerjasama internasional diwujudkan melalui penciptaan institusi atau rezim. Varian liberalisme, yang dikenal sebagai liberalisme institusional, menjelaskan bagaimana institusi internasional memfasilitasi kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat. Penciptaan institusi atau rezim dalam liberalisme, seperti liberalisme institusional yang menggambarkan bagaimana institusi internasional memfasilitasi kerjasama, menjadi landasan yang memungkinkan diplomasi menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerjasama internasional. Diplomasi menjadi tonggak penting dalam kerangka liberalisme dalam konteks kerjasama internasional. Secara khusus, diplomasi berfungsi sebagai alat utama yang memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kesepakatan antara negara-negara atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Contoh konkretnya yaitu kemitraan antara Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU). Melalui diplomasi, Pos Indonesia dan UPU mungkin telah melakukan berbagai perundingan untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pertukaran pos yang lancar dan saling menguntungkan antara negara-negara anggota. Ini bisa termasuk pembahasan tarif, standar layanan, regulasi, dan penyelesaian sengketa (International Bureau of the Universal Postal Union, 2018).

International Bureau of the Universal Postal Union (2018) menyatakan jumlah negara anggota Universal Postal Union (UPU) menegaskan kedalaman serta cakupan organisasi ini dalam skala global. Dengan 192 negara sebagai anggotanya, UPU memperlihatkan representasi yang sangat luas dari negara-negara di seluruh dunia. Keanggotaan yang meluas ini mencerminkan penerimaan yang signifikan terhadap kerjasama internasional dalam bidang pos. Fakta bahwa 192 negara telah bergabung dalam UPU menunjukkan bahwa organisasi ini berhasil menyatukan sejumlah besar negara, meskipun mereka mungkin memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai konteks, seperti budaya, ekonomi, dan geopolitik. Hal ini menegaskan pentingnya layanan pos dalam konteks global serta kesadaran akan manfaat kolaborasi lintas batas untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran barang secara efisien (Pos Indonesia, 2022). Keanggotaan yang mencakup hampir seluruh negara di dunia juga menunjukkan bahwa UPU memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan standar internasional, kebijakan, dan praktik terkait layanan pos. Hal tersebut membuktikan bahwa negara-negara di seluruh dunia mengakui nilai penting dari kerjasama dalam memperluas dan meningkatkan layanan pos bagi masyarakat global (International Bureau of the Universal Postal Union, 2018).

Diplomasi dalam konteks ini dapat memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip liberalisme, seperti saling ketergantungan dan keuntungan bersama, diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Negara-negara, termasuk Pos Indonesia dan UPU sebagai organisasi internasional, mungkin telah menggunakan diplomasi untuk menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui pertukaran pos yang lebih efisien, dan memperkuat kerjasama internasional dalam aspek logistik dan

komunikasi. Apabila terdapat diplomasi yang efektif, tentunya kemitraan seperti ini mungkin telah mendorong terciptanya kerangka regulasi yang mendukung liberalisme dalam perdagangan internasional, memperlihatkan bahwa diplomasi bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga pondasi untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam kerjasama internasional. Dengan demikian, melalui tinjauan mendalam terhadap asumsi-asumsi dasar liberalisme, kita dapat meraih pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pandangan ini membentuk pemikiran kita tentang hubungan internasional. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis dampak kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU) dengan menggunakan lensa liberalisme dalam mengurai dinamika diplomasi, perdagangan, dan kestabilan global.

### **Metodologi**

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif untuk menganalisis dinamika diplomasi Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU) dalam kerangka teori liberalisme dalam hubungan internasional. Rancangan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi fokus penelitian pada kemitraan Pos Indonesia dengan UPU dan dampaknya pada diplomasi, perdagangan, dan kestabilan global. Pemilihan data melibatkan identifikasi dokumen resmi, pernyataan diplomatik, laporan ekonomi, dan analisis kebijakan terkait sebagai data primer dan sekunder yang relevan.

Selanjutnya, studi literatur dilakukan untuk memahami sejarah kemitraan, aspek diplomatik, dan implikasinya. Penelitian kepustakaan menjadi jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan atau studi literatur, di mana para ilmuwan menggunakan berbagai literatur untuk mengumpulkan data dan menggunakan metodologi kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau menggunakan literatur sebagai sumber utama dikenal dengan istilah library research atau penelitian kepustakaan (Kunardi, 2019).

Studi literatur, menurut Danial dan Warsiah (2009:80), adalah jenis penelitian di mana peneliti mengumpulkan berbagai buku dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitiannya. Metode ini digunakan untuk mengungkap beberapa hipotesis yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau dihadapi guna memberikan tubuh pengetahuan bagi penyelidikan. Analisis kebijakan melibatkan penelusuran dokumen resmi dan pernyataan pemerintah terkait. Analisis data fokus pada kajian diplomasi, dampak ekonomi, perdagangan internasional, dan kontribusi terhadap kestabilan global dengan menyoroti prinsip-prinsip liberalisme. Kesimpulan dari analisis ini akan dirangkum dalam konteks implikasi jangka panjang terhadap diplomasi, perdagangan, dan stabilitas global, memberikan pandangan untuk perkembangan masa depan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Liberalisme sebagai paradigma, teori, dan filsafat politik, memperoleh pemahaman yang unik dalam konteks hubungan internasional. Berbeda dengan aliran-aliran lain dalam

filosof ilmu, liberalisme diartikan sebagai suatu pandangan optimis yang menandai perbedaannya dengan realisme. Optimisme liberalisme bersumber dari keyakinan filsafat pencerahan bahwa manusia, dengan rasio yang dimilikinya, pada dasarnya baik. Rasionalitas manusia, yang menduduki posisi sentral dalam pemikiran Barat, bukan hanya sebagai pertimbangan untung-rugi, melainkan sebagai pembebasan dari segala bentuk represi terhadap hak-hak manusiawi. Dalam kerangka pemikiran liberalisme klasik, kebebasan individu dianggap sebagai hal yang paling mulia. Para penganut liberalisme klasik percaya bahwa membebaskan nalar manusia adalah kunci kemajuan. Dalam konteks ilmu hubungan internasional, liberalisme, kendati terkadang dianggap sebagai filsafat politik, dianggap sebagai suatu "program riset" yang melibatkan tiga asumsi dasar. Pertama, liberalisme menekankan peran aktor utama sebagai individu dan kelompok masyarakat. Perspektif liberalisme memandang hubungan internasional sebagai hasil dari interaksi dan tindakan individu dan kelompok dalam konteks politik domestik.

Kedua, liberalisme melihat negara sebagai representasi dan pemain utama yang berasal dari kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemerintah, dalam pandangan liberalisme, dianggap sebagai saluran aspirasi dari kepentingan aktor-aktor domestik. Keempat, liberalisme menyoroti interdependensi sebagai karakteristik utama dalam hubungan internasional. Berbeda dengan realisme yang pesimistis terhadap sifat negara, liberalisme meyakini bahwa negara lebih cenderung untuk bekerja sama dalam menghadapi anarki internasional. Dalam upaya untuk meminimalisir rasa saling curiga dan meningkatkan kerjasama internasional, liberalisme mengakui pentingnya institusi atau rezim. Liberalisme institusional, sebagai varian dari pemikiran liberalisme, mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara realisme dan liberalisme dengan mempromosikan interdependensi dan kerjasama melalui institusi internasional. Dengan demikian, liberalisme memberikan kontribusi yang unik dalam membentuk pandangan tentang dinamika hubungan internasional (Rosyidin, 2022).

Kontribusi unik dari liberalisme dalam membentuk pandangan tentang dinamika hubungan internasional menjadi penting untuk diuraikan dalam memahami bagaimana pandangan liberalisme membentuk dan mengarahkan interaksi di tingkat internasional, termasuk dalam dinamika diplomasi yang muncul dari kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU). Dalam memahami dinamika diplomasi yang muncul dari kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU), perlu diperinci bagaimana pandangan liberalisme membentuk dan mengarahkan interaksi di tingkat internasional. Merujuk kedalam kerangka pemikiran liberal, diplomasi dianggap sebagai alat yang sangat penting dalam mempromosikan kerjasama dan membangun hubungan yang positif di antara negara-negara. Kemitraan ini bukan hanya tentang layanan pos, tetapi juga melibatkan upaya bersama untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan politik.

Pada pembahasan diplomasi ekonomi, kemitraan ini membawa kontribusi signifikan dalam mengamplifikasi keberhasilan Pos Indonesia di pasar internasional. Dengan mengadopsi standar layanan pos yang tinggi bersama-sama dengan UPU, Pos Indonesia dapat membangun citra positif di panggung global. Diplomasi ekonomi yang terfokus pada

pemajuan teknologi, inovasi, dan keunggulan dalam layanan pos dapat membuka pintu untuk lebih banyak peluang kerja sama dengan negara-negara lain. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdagangan dan bisnis lintas batas menjadi agenda utama dalam dinamika ini (Yunaida, 2017). Selain itu diplomasi politik yang muncul dari kemitraan ini memberikan dimensi baru terhadap peran Pos Indonesia di komunitas internasional. Dalam kerangka liberalisme, menciptakan kepercayaan di tingkat internasional adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Melalui kemitraan dengan UPU, Pos Indonesia dapat memperoleh legitimasi dan dukungan internasional, yang pada gilirannya dapat memengaruhi citra dan posisi diplomatis di forum internasional. Kepercayaan yang dibangun melalui kerja sama dalam layanan pos dapat membuka pintu untuk dialog lebih lanjut dalam berbagai isu global (Wahyuningsih, 2015).

Kemitraan antara Pos Indonesia dan Uni Pos Universal (UPU) mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia dalam layanan pos global. Dalam UPU, Indonesia memiliki peran penting sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Dewan UPU. Dengan menjadi anggota, Indonesia dapat memengaruhi kebijakan global terkait layanan pos (Abidjan, 2021). Tanggung jawab Indonesia terhadap kemitraan Pos Indonesia dan UPU sangat mencakup. Salah satunya sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia melalui layanan pos. Ini tidak hanya berdampak pada pengiriman surat dan paket, tetapi juga memungkinkan Indonesia untuk memiliki suara dalam arah strategis perkembangan pos global. Indonesia juga memperjuangkan kepentingannya, seperti jaminan pengiriman uang bagi pekerja migran. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan warga negaranya di kancah internasional. PT Pos Indonesia, yang telah berusia 269 tahun, menghadapi tantangan ekspansi ke pasar internasional. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan tersebut berkomitmen untuk tumbuh dan bersaing secara global. Di sisi UPU, perannya dalam mengembangkan layanan pos sangat signifikan. UPU memberikan bantuan teknis, menetapkan aturan pertukaran surat internasional, dan mengoordinasikan kebijakan serta sistem pos antarnegara. Ini membantu mengatur biaya pengiriman secara efisien dan mendorong penggunaan standar yang seragam di seluruh anggota UPU (Thuwal, 2023).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki peran aktif dalam layanan pos global melalui kemitraan dengan UPU, tetapi juga bahwa UPU sendiri berperan penting dalam mengkoordinasikan sistem pos internasional. Thuwal (2023) menyampaikan keterlibatan Indonesia dan peran UPU menunjukkan komitmen terhadap pengembangan layanan pos yang efektif, efisien, dan terintegrasi di tingkat global, serta kesadaran akan kebutuhan akan standar yang seragam dalam layanan pos internasional. Ketika melibatkan diri dalam analisis dampak ekonomi kemitraan Pos Indonesia dengan UPU, konsep liberalisme memainkan peran sentral. Liberalisme menegaskan pentingnya perdagangan bebas, dan dalam konteks kemitraan ini, bukan hanya terkait dengan pengiriman surat-menyurat, tetapi juga dengan menggalang perdagangan barang dan jasa secara umum (Basit, 2023). Kemitraan dengan UPU memberikan Pos Indonesia akses lebih besar ke pasar global. Dengan mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh UPU, Pos Indonesia dapat dengan lebih mudah berintegrasi dalam jaringan perdagangan internasional. Ini membuka peluang bagi Pos Indonesia untuk memperluas layanan dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional (Fadh, 2021).

Dalam konteks kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU), dampak ekonomi memperlihatkan landasan yang kuat dalam konsep liberalisme ekonomi. Lebih dari sekadar pengiriman surat, kemitraan ini menciptakan efek yang jauh lebih luas terhadap perekonomian nasional. Secara khusus, efeknya sangat terasa dalam tiga aspek utama: akses pasar global yang diperluas, pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, dan kemajuan teknologi serta inovasi. Pertama, kemitraan dengan UPU memberi Pos Indonesia akses lebih luas ke pasar global. Dengan mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh UPU, PT. Pos Indonesia dapat lebih mudah menjembatani diri dalam jaringan perdagangan internasional. Ini memungkinkan perluasan layanan, termasuk pengiriman barang dan jasa secara internasional, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing di pasar global. Kedua, konsep liberalisme perdagangan bebas yang menjadi landasan kemitraan ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terlibat dalam perdagangan yang lebih terbuka, PT. Pos Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan investasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan secara langsung bagi perusahaan tersebut tetapi juga berpotensi memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ketiga, aspek yang sering terabaikan dimana kemitraan ini memajukan teknologi dan inovasi dalam layanan pos. Dengan berbagi praktik terbaik dan teknologi terkini melalui kerja sama dengan UPU, Pos Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi konsumen tetapi juga membuka pintu bagi pengembangan bisnis baru di sektor logistik dan pengiriman.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks liberalisme, aspek lain dari ekonomi yang muncul dari kemitraan ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi tetapi juga tentang pemajuan teknologi dan inovasi. Dengan berbagi praktik terbaik dan teknologi terkini dalam layanan pos, Pos Indonesia dapat mengoptimalkan operasionalnya, memberikan nilai tambah bagi konsumen, dan membuka peluang untuk bisnis baru. Dalam keseluruhan, kemitraan Pos Indonesia dengan UPU bukan hanya tentang pertukaran layanan pos, tetapi juga mengenai bagaimana liberalisme sebagai paradigma ilmu hubungan internasional dapat membentuk dan memandu interaksi antarnegara di tingkat global. Diplomasi yang kuat dan dampak ekonomi positif adalah dua elemen kunci yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk memahami kedalaman dan kompleksitas hubungan ini (Yuni dan Hutabarat, 2021). Dampak ekonomi dari kemitraan ini mencakup tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemajuan teknologi, inovasi, dan kesempatan bisnis yang lebih luas. Seiring dengan elemen-elemen diplomasi yang kuat, kemitraan ini bukan hanya tentang pertukaran layanan pos semata, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana paradigma liberalisme dalam hubungan internasional dapat membentuk dinamika antar negara dalam skala global. Analisis mendalam terhadap dampak ekonomi menjadi kunci untuk memahami secara komprehensif kedalaman dan kompleksitas hubungan ini dalam konteks global.

Dari perspektif Liberalisme keamanan global bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga melibatkan kerjasama antarnegara dan pembentukan rezim internasional. Kemitraan antara Pos Indonesia dan Universal Postal Union (UPU) menjadi suatu contoh konkret kontribusi terhadap stabilitas global. Dalam kerangka pemikiran liberal, penerapan praktik-

praktik terbaik dalam pengelolaan layanan pos dan perlindungan keamanan informasi menjadi kunci penting dalam menciptakan kolaborasi sukses, terutama menghadapi tantangan global seperti kejahatan siber dan perdagangan ilegal. Melalui kemitraan ini, Pos Indonesia dan UPU dapat menciptakan norma-norma bersama yang meningkatkan keamanan dalam layanan pos internasional. Adanya standar yang disepakati bersama dapat mengurangi risiko terhadap pelanggaran keamanan, membangun kepercayaan antarnegara, dan menciptakan lingkungan yang stabil. Liberalisme meyakini bahwa kerjasama ini bukan hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan global (Widodo, 2017).

Dalam kemitraan antara Pos Indonesia dan UPU, aspek-aspek spesifik dari liberalisme memainkan peran penting dalam mengembangkan layanan pos. Prinsip perdagangan bebas yang dipegang teguh oleh liberalisme memungkinkan akses yang lebih luas terhadap teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi logistik. Ini mencakup penggunaan sistem otomatisasi, pelacakan real-time, dan pengelolaan inventaris yang lebih baik, yang semuanya dapat meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Selain itu, liberalisme menekankan pada interdependensi antara negara dan institusi internasional. Kemitraan antara Pos Indonesia dan UPU mencerminkan kolaborasi lintas batas yang didasarkan pada prinsip saling bergantung. Melalui UPU, liberalisme mendorong pertukaran teknologi, praktik terbaik, dan standar universal dalam layanan pos, memungkinkan perkembangan yang seragam di seluruh dunia.

Aspek lain dari liberalisme yaitu pemberdayaan individu untuk inovasi. Kemitraan ini memberikan ruang bagi pengembangan teknologi baru dalam layanan pos. Kebebasan individu dan perusahaan untuk berinovasi mendorong penemuan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam pengiriman dan penanganan pos (Ardiputra & Prawira, 2020). Dari perspektif liberal, kemitraan Pos Indonesia dan UPU bukan hanya tentang layanan pos tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Model ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip liberalisme tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga merangsang perubahan positif dalam industri jasa secara global. Dengan terus mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme, kemitraan ini bisa menjadi contoh bagi sektor jasa lainnya. Dorongan terhadap teknologi terkini, kebebasan untuk berinovasi, dan pembentukan lingkungan bisnis yang dinamis dapat merubah paradigma layanan pos secara global menuju arah yang lebih progresif dan inklusif (Ardiputra & Prawira, 2020).

Dalam konteks pengembangan layanan pos, liberalisme menjadi panduan utama dalam mendorong inovasi dan kemajuan. Pos Indonesia dan UPU, sebagai penganut pandangan liberalisme, dapat bersama-sama mengembangkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Kebebasan individu dan peran masyarakat menjadi fokus dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan teknologi dan pelayanan pos. Dalam perspektif liberal, pemberdayaan individu untuk menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi baru adalah kunci dalam mencapai kemajuan. Oleh karena itu, kemitraan antara Pos Indonesia dan UPU tidak hanya tentang pertukaran layanan pos tetapi juga tentang

memfasilitasi inovasi dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan (Suhartini et al., 2018).

Kemitraan antara Pos Indonesia dan Uni Pos Universal (UPU) tercermin dalam penggunaan prinsip-prinsip liberalisme yang mendukung pertumbuhan layanan pos lintas negara. Prinsip perdagangan bebas memainkan peran utama dengan mengizinkan Pos Indonesia untuk berpartisipasi dalam layanan pos lintas negara tanpa hambatan perdagangan yang signifikan. Ini memungkinkan perluasan jangkauan layanan posnya secara global tanpa terhalang oleh batasan perdagangan yang berlebihan. Asri (2008) menjelaskan bahwa konsep interdependensi menyoroti ketergantungan antarnegara dalam layanan pos lintas negara. Adanya ketergantungan ini mendorong kerja sama dan kemitraan yang erat antara Pos Indonesia dan UPU. Dalam lingkungan yang saling terkait ini, kerjasama menjadi lebih penting untuk memastikan layanan pos yang efektif dan efisien di seluruh dunia.

Partisipasi Pos Indonesia dalam UPU sebagai institusi internasional memperkuat aspek liberalisme ini. UPU mendukung standar universal, kerja sama, dan pertukaran informasi antar anggota untuk meningkatkan efisiensi layanan pos lintas negara. Sebagai anggota UPU, Pos Indonesia berada dalam posisi yang mendukung untuk mendorong pertumbuhan layanan pos secara global sesuai dengan standar yang disepakati bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam pengembangan layanan pos, kemitraan ini dapat menjadi model bagi sektor jasa lainnya. Liberalisme mendorong adopsi teknologi terkini, memberikan kebebasan bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan demikian, melalui perspektif liberalisme, kemitraan Pos Indonesia dan UPU tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga berpotensi untuk merubah lanskap layanan pos global ke arah yang lebih progresif (Asri, 2008).

Pos Indonesia dapat mengatasi tantangan dan hambatan dalam kemitraan dengan UPU dengan melakukan berbagai upaya, pertama meningkatkan kualitas layanan. Pos Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas layanannya agar dapat bersaing dengan perusahaan pos dari negara lain. Hal ini dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (Oktasari, 2010). Kedua, Pos Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya agar dapat memperoleh keuntungan dari kemitraan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh UPU, seperti akses ke pasar global dan teknologi terkini. Selain itu, Pos Indonesia perlu membangun hubungan yang kuat dengan UPU agar dapat memperoleh dukungan dari UPU dalam mengatasi tantangan dan hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan UPU dan memberikan kontribusi yang positif bagi UPU.

Oktasari (2010) menyatakan Pos Indonesia, dalam menjalin kemitraan dengan UPU, menghadapi beragam tantangan dan hambatan yang memerlukan strategi terencana untuk diatasi. Pertama, adalah meningkatkan kualitas layanan sebagai fondasi utama dalam persaingan dengan perusahaan pos dari negara lain. Untuk mencapai hal ini, Pos Indonesia

perlu fokus pada pengembangan teknologi mutakhir dan infrastruktur yang memadai. Investasi dalam teknologi canggih seperti sistem pelacakan paket, efisiensi operasional, dan layanan pelanggan yang responsif akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan daya saing. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas layanan. Pelatihan yang berkesinambungan, pembangunan keterampilan, dan peningkatan kompetensi SDM akan membantu Pos Indonesia beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar secara lebih efektif. Kedua, untuk mengoptimalkan manfaat dari kemitraan dengan UPU, Pos Indonesia harus dapat mengasah daya saingnya. Ekspansi ke pasar global dan adopsi teknologi terbaru yang didukung oleh UPU dapat menjadi momentum besar. Akses yang lebih luas ke pasar internasional dan kolaborasi dengan pemain global akan membuka pintu bagi kesempatan bisnis yang lebih besar (Sidik, 2015). Selain itu, penting bagi Pos Indonesia untuk membangun hubungan yang erat dengan UPU. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan UPU, seperti konferensi, forum, atau inisiatif kolaboratif, Pos Indonesia dapat memperluas jaringan, memahami dinamika pasar global, dan memperoleh dukungan strategis dari UPU. Memberikan kontribusi yang berarti dan solutif bagi keberlangsungan UPU juga akan memperkuat posisi Pos Indonesia dalam memecahkan tantangan dan hambatan.

Dalam keseluruhan, strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kualitas layanan, peningkatan daya saing, dan pembangunan hubungan yang kuat dengan UPU akan menjadi pilar bagi Pos Indonesia dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam kemitraan dengan UPU. Dengan pendekatan ini, Pos Indonesia dapat menjaga relevansinya dalam lingkungan bisnis global yang berubah dengan cepat.

### **Kesimpulan**

Dalam konteks kemitraan antara Pos Indonesia dan Universal Postal Union (UPU), paradigma liberalisme memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan dinamika hubungan internasional. Diplomasi, ekonomi, keamanan global, dan pengembangan layanan pos semuanya tercermin dalam pandangan liberalisme yang memandang kerjasama sebagai kunci untuk mencapai tujuan bersama. Diplomasi ekonomi yang diperkuat oleh kemitraan ini membawa dampak positif pada citra Pos Indonesia di tingkat internasional. Melalui pengadopsian standar layanan pos yang tinggi, Pos Indonesia dapat membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan diplomatik. Diplomasi politik yang muncul dari kemitraan ini memberikan dimensi baru terhadap peran Pos Indonesia di forum internasional, menggambarkan bagaimana liberalisme memandang pentingnya penciptaan kepercayaan sebagai landasan untuk hubungan internasional yang kuat.

Dampak ekonomi kemitraan ini, yang dianalisis dengan lensa liberalisme perdagangan bebas, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga pada pemajuan teknologi dan inovasi. Dengan memanfaatkan akses pasar global dan berbagi praktik terbaik, Pos Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Penting untuk dicatat bahwa kemitraan ini bukan hanya tentang layanan pos, melainkan juga tentang kontribusi terhadap keamanan global. Liberalisme memandang pentingnya kerjasama internasional dan pembentukan rezim untuk mengatasi

tantangan bersama, termasuk kejahatan siber dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, kemitraan Pos Indonesia dengan UPU memberikan contoh konkret bagaimana liberalisme dapat berperan dalam menciptakan stabilitas global.

Dalam pengembangan layanan pos, liberalisme memberikan panduan untuk inovasi dan kemajuan. Pos Indonesia dan UPU, sebagai penganut pandangan liberalisme, dapat bersama-sama mengembangkan teknologi terkini dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Melalui kemitraan ini, liberalisme tidak hanya menciptakan pertukaran layanan, tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan di tingkat global. Dalam pengembangan layanan pos, liberalisme memainkan peran utama dalam mendorong inovasi, pertumbuhan, dan standar yang seragam di tingkat global. Kemitraan Pos Indonesia dengan UPU bukan hanya tentang layanan pos semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip liberalisme membentuk interaksi antar negara di skala global. Peran institusi internasional seperti UPU menjadi kunci dalam memfasilitasi kerjasama lintas negara dan menegakkan standar yang setara.

Namun, ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, termasuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat daya saing, dan membangun hubungan yang kuat dengan UPU. Pos Indonesia harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta pasar global untuk memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari kemitraan ini. Secara keseluruhan, kemitraan Pos Indonesia dengan UPU mencerminkan bagaimana paradigma liberalisme dapat membentuk dan memandu interaksi antarnegara. Dalam era globalisasi, di mana batas antara negara dan non-negara semakin kabur, liberalisme memberikan landasan untuk kerjasama internasional yang berkelanjutan. Kemitraan ini bukan hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga membentuk dinamika diplomasi, perdagangan, keamanan, dan pengembangan layanan pos di tingkat global.

### **Daftar Pustaka**

- Jackson, Robert dan Sorensen, George. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidjan. (2021, August 27). *Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Postal Operations Council Universal Postal Union Periode 2021-2024*. Kemlu. Retrieved December 28, 2023, from <https://kemlu.go.id/dakar/id/news/15625/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-postal-operations-council-universal-postal-union-periode-2021-2024>
- Ardiputra, S., & Prawira, M. R. (2020). *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR POS CABANG PASANGKAYU 91571*. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis>
- Asri, A. (2008). *etergantungan ini mendorong kerja sama dan kemitraan yang erat antara Pos Indonesia dan UPU*. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2023-5/120537-T%2025566-Andi%20Sari.pdf>

- Basit, A. (2023). *COMPARISON OF CONCEPTS AND PRACTICES OF CITIZENSHIP BETWEEN LIBERAL DEMOCRACY AND PANCASILA DEMOCRACY*. <https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/8-135-basit-86-99.pdf>
- Fadh, M. (2021). *KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UNIVERSAL POSTAL SERVICES (LAYANAN POS UNIVERSAL) SEBAGAI PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN PERBANDINGANN AN PERBANDINGANNYA DI BEBERAP A DI BEBERAPA NEGARA*. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=dharmasisya>
- International Bureau of the Universal Postal Union. (2018). *Constitution and General Regulations Manual*. Universal Postal Union. Retrieved December, 2023, from <https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/manualsInThreeV olumes/actInThreeVolumesConstitutionAndGeneralRegulationsEn.pdf>
- Jackson, Robert dan Sorensen, George. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kunardi. (2019). *PUSTAKAWAN PENELITI: STUDI LITERATUR*. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/bibliotech/article/download/1035/1029>
- Mansbach, R. W. & Rafferty, K. L. 2008. *Introduction to Global Politics*. New York: Routledge.
- Oktasari, M. (2010). *PELAKSANAAN KEMITRAAN PT. POS INDONESIA DENGAN MITRA USAHA DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS PELAYANAN*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160003/1/Mulinda%20Oktasari.pdf>
- Pos Indonesia. (2022). *Pos Indonesia*. Pos Indonesia. Retrieved December, 2023, from <https://www.posindonesia.co.id/id/content/universal-postal-union>
- Rosyidin, M. 2022. Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. *Jurnal Indonesian Perspective*. 7(2): 134-144.
- Sidik, F. (2015, February 27). *UPU: Indonesia Berpengaruh Kuat di Pos Asean*. Bandung. Retrieved December 28, 2023, from <https://bandung.bisnis.com/read/20150227/549/1061559/upu-indonesia-berpengaruh-kuat-di-pos-asean>
- Sudagung, A. D., Bainus, A., & Chalid, A. M. 2015. Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 5(1): 31-42.
- Suhartini, Prabowo, R., Hariastuti, N. L. P., & Rafsanjani, A. D. (2018). *Implementation of Kano Methods to Service Quality Improved at PT. Pos Indonesia*. <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/download/4624/3298>
- Thuwal, S. (2023, October 31). *Universal Postal Union Tracking 1874: Powerful Guide*. WareIQ. Retrieved December 28, 2023, from <https://wareiq.com/resources/blogs/universal-postal-union-tracking/>
- Wahyuningsih, S. 2015. Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Effectiveness Of The Implementation Of Postal Service. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*. 5(2): 115-138.
- White, B. 2001. "Diplomacy" Dalam John Baylis dan Steve Smith (penyunting). *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Global & Policy Vol.12, No.1 Janari-Juni 2024*

*Dinamika Diplomasi Pos: Kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU)  
dalam Perspektif Hubungan Internasional*

- Relations (2<sup>nd</sup> edition)*. John Baylis dan Steve Smith (editor). Oxford: Oxford University Press.
- Widodo, E. S. 2017. Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global. *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha*. 1(1).
- Yunaida, E. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan Produk Surat dan Paket Kantor Pos Langsa*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/196993-none-8ef3a0c9.pdf>
- Yuni, R., & Hutabarat, D. L. 2021. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal NAGAWAN*. 10(1): 62-69.